BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan dalam perpolitikan Indonesia dimulai sejak era reformasi. Hal ini ditandai dengan sistem demokrasi yang lebih terbuka, di mana hak-hak warga negaranya lebih dihargai yang tercermin dalam pemilihan presiden atau kepala daerah. Pemilihan kepala daerah telah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon-calon kepala daerah yang dikehendakinya secara langsung tanpa diwakili oleh DPRD. Sistem pemilihan secara langsung dengan mengumpulkan suara terbanyak seperti ini yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar turut berpartisipasi dalam demokrasi politik, karena partisipasi masyarakat dalam menyalurkan suara politiknya akan menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setidaknya lima Tahun ke depan.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang digelar di tanah air sejak Tahun 2005, memberikan kesempatan yang luas bagi pemilih untuk menentukan pilihannya sesuai keinginan dan hati nurani masing-masing yang ada di daerah. Disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999, telah mengubah tata cara pemilihan kepala daerah. Kepala daerah yang sebelumnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diubah menjadi dipilih langsung oleh masyarakat. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 56

ayat 1 undang-undang tersebut yaitu, ”Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Dengan demikian gubernur, bupati dan walikota yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2005 dan setelahnya akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan langsung yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).[1]

Pada Tahun 2020 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali dilakukan dalam keadaan pandemi Covid-19, pelaksanaan Pilkada ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Terdapat 270 daerah yang melaksanakan Pilkada secara serentak, pembagian 270 tersebut terdapat 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Pilkada serentak seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena pilkada Kota Makasaar diulang pelaksanaannya. Beberapa provinsi diantaranya adalah Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau dan salah satunya adalah Sumatera Barat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagai dasar pelaksanaan Pilkada 2020.[2] Komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan calon menjadi salah satu pengaruh dalam

[1] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, tentang Pemilu di masa pandemi
[2] *Ibid*

sukses atau tidaknya seseorang untuk memperoleh simpati dan suara masyarakat sehingga komunikasi politik menjadi strategi yang cukup relevan digunakan oleh setiap orang yang ingin maju dalam kontestasi politik.

Untuk mengikuti pilkada mengharuskan setiap pasangan calon untuk menyusun dan memikirkan setiap strategi yang ingin digunakan, berbgai macam strategi yang disusun nantinya akan digunakan untuk meyakinkan dan mendapatkan suara dari masyarakat, termasuk strategi komunikasi politik. Komunikasi politik memiliki peran penting bagi pasangan calon yang ingin mengikuti kontestasi politik. Pemahaman terkait strategi komunikasi harus dimiliki oleh partai yang mengusung pasangan calon, pasangan calon yang bersaing, dan juga tim sukses yang akan memperkenalkan pasangan calon kepada masyarakat. Partai politik harus memiliki pemahaman yang baik terhadap pola komunikasi yang akan digunakan kepada masyarakat, sehingga nantinya pola komunikasi yang digunakan dapat membantu pasangan calon yang diusung oleh partai terebut, penggunaan metode komnikasi dua arah menjadi sangat efektif untuk digunakan oleh sebuah partai politik.

Dalam melakukan pola komunikasi dua arah, membutuhkan proses sense-giving dan sense-making, senses-giving adalah suatu proses komunikasi ketika partai mencoba mengkomunikasikan ide dan gagasan partai, program kerja dan platform, serta ideologi partai ke masyarakat dan konstituen mereka. Tujuan utama dari proses ini adalah agar hal-hal yang diperkirakan dan direncanakan partai politik bersangkutan dapat diterima dan dimengerti oleh para konstituen

dan masyarakat luas. Sedangkan sense-making, di mana masyarakat dan konstituen akan memberikan tanda-tanda reaksi mereka atas apa yang dikomunikasikan oleh partai politik atau proses juga dapat terjadi sebelum partai politik mengkomunikasikan program kerja mereka.[3]

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tentunya masing-masing pasangan calon memiliki berbagai macam strategi agar meningkatnya keyakinan masyarakat kepada pasangan calon yang bersaing, untuk meningkatkan keyakinan tersebut pasangan calon dituntut untuk memiliki pola komunikasi politik yang baik. Komunikasi secara bahasa ataupun secara Terminologi memiliki bahasa latin yaitu Communico yang memiliki arti membagi, dan Communis yang berarti membangun kebesamaan antara dua orang atau lebih, komunikasi juga diartikan suatu interaksi pengiriman atau penerimaan pesan berupa berita dan informasi antara dua pihak atau lebih. Komunikasi pun dibutuhkan dalam semua bidang yang ada di kehidupan ini, salah satunya yaitu dalam bidang politik.[4]

Politik adalah fenomena yang terkait erat dengan proses berkomunikasi karena menjadi politisi atau aktor dalam politik terkait dalam masyarakat secara langsung maupun tidak langsung harus bisa berperan secara komunikatif dalam pekerjaan, sebab yang dilakukan oleh mereka mengatur hubungan kekuasaan sosial dan membuat keputusan yang mengatur alokasi dan distribusi sumber daya

[3] Hendra Kurnia Pulungan, "Komunikasi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Barat (Studi Kasus tentang Komunikasi Politik pasangan H. Amril Harahap dan H. Irwandy, M.Pd, pada Pemilihan Walikota Tebing Tinggi 2010)"
[4] Modul Komunikasi Politik Prodi KPI IKHAC Mojokerto

sosial serta pembangunan *public trust*. Melakukan peran-peran ini dengan semestinya melibatkan komunikasi tentang pilihan-pilihan yang ada. Komunikasi ini mungkin melibatkan diskusi tatap muka langsung, atau mungkin melalui mediasi perantara seperti utusan, tentara atau jurnalis. P. Eric Louw mengemukakan bahwa komunikasi politik adalah sebuah fenomena multi bentuk dan multi dimensi terkait berbagai fenomena politik dan sosial di masyarakat ataupun di pemerintah yang dapat dilihat dari penyampaian pidato, bahasa tubuh, memorandum, rilis media dan kekerasan politik.[5]

Komunikasi politik menjadi kajian yang menarik perhatian, bukan hanya para sarjana komunikasi dan sarjana politik, tetapi juga bagi politisi yang aktif di berbagai partai politik. Plano melihat bahwa "Komunikasi politik merupakan proses penyebaran, makna atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik". Ini menjadi sebuah tantangan kebehasilan partai politik, gabungan partai, tim sukses untuk mengusung calonnya sangat ditentukan oleh kemampuannya melihat tingkat aktraktivitas dan akseptabilitas calon tersebut di mata masyarakat.

Peranan komunikasi politik dibutuhkan untuk melihat dampak dan hasil yang bersifat politik.[6] Melvin L DeFleur memetakan Model Transaksi Simultan terhadap dinamika komunikasi politik. Dengan karaktenya yang non-linear, model ini menggambarkan sekurang-kurangnya tiga faktor yang berpengaruh dalam komunikasi. Pertama, faktor lingkungan fisik, yakni lingkungan tempat

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[5] *Ibid*
[6] Moh. Rofiq, 2012, Dependency Theory. *Jurnal Hikmah*, VI(I): 2-12

komunikasi itu berlangsung dengan menekankan pada aspek *what* dan *how* pesan-pesan komunikasi itu dipertukarkan. Kedua, faktor situasi sosio-kultural, yakni bahwa komunikasi merupakan bagian dari situasi sosial yang di dalamnya terkandung makna kultural tertentu, sekaligus menjadi identitas dari para pelaku komunikasi yang terlibat di dalamnya. Ketiga, faktor hubungan sosial, yakni bahwa status hubungan antar pelaku komunikasi sangat berpengaruh, baik terhadap isi pesan itu sendiri ataupun proses bagaimana pesan itu dikirim.[7] Sedangkan dalam teori komunikasi dua tahap dijelaskan bahwasanya pesan-pesan media massa tidak seluruhnya langsung mengenai audience. Oleh karenanya, di dalam model ini ada pihak- pihak tertentu yang membawa pesan dari media untuk diteruskan kepada masyarakat. Pihak-pihak itu disebut sebagai opinion leader (pemuka pendapat).[8]

Ada beberapa penelitian terkait dengan Strategi Komunikasi Politik, pertama, penelitian dari Rahmawan Cibro dan penelitian dari Syarifuddin menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik dapat dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik dan komponen komunikasi yakni komunikator, isi pesan, media, komunikan, dan umpan balik.[9] Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rosit menunjukkan, strategi komunikasi politik yang membuat pasangan Ratu Atut dan Rano Karno memenangkan Pilkada Banten 2011 di antara lain: Ratu Atut masih merawat tim suksesnya dengan baik, didukung oleh

---

[7] *Ibid*
[8] Nurudin, 2000, Pengantar Komunikasi Massa, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 88
[9] Rahmawan Cibro, 2018, Startegi Komunikasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Aceh Singkil (Studi Kasus tentang Strategi Komunikasi Politik Pasangan Dulmusrid-Sazali pada Pemilihan Bupati Aceh Singkil Tahun 2017), *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

11 partai pendudukng dan 22 partai non parlemen, di samping mempunyai popularitas dan elektabilitas tinggi, ia juga menggunakan faktor ketokohan dan jaringan politiknya yang kuat dan kokoh, dan ke semua strategi komunikasi politik berdasarkan hasil rekomendasi survei.[10]

Pada penelitian kali ini peneliti juga mengkaji terkait dengan Strategi Komunikasi Politik, namun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada penelitian kali ini peneliti ingin melihat strategi komunikasi politik pasangan Benny Dwifa Yuswir-Irradatillah dari bagaimana komunikasi politk yang dibangun oleh pasangan Benny Dwifa Yuswir-Irradatilah terhadap elit lokal yang berada di Kecamatan Kamang Baru sebagai kebaharuan yang dilahirkan. Kemudian, pada penelitian kali ini peneliti menggunakan teori dari Melvin L DeFleur dengan Model Transaksi Komunikasi Simultan dan teori komunikasi dua tahap.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[10] Muhammad Rosit, 2012, Strategi Komunikasi dalam Pilkada (Studi Kasus Strategi Pemenangan Pasangan Ratu Atut dan Rano Karno dalam Memenangkan Pilkada Banten 2011), *Skripsi*, Universitas Indonesia

1.2 Rumusan Masalah

Pelaksanaan Pilkada yang terjadi di Sumatera Barat, pada Pilkada Bupati di Sumatera Barat tentunya diwarnai dengan berbagai macam strategi yang digunakan oleh masing- masing pasangan calon. Begitu juga dengan Pilkada di Kabupaten Sijunjung dengan mengusung lima pasangan calon yang bertarung untuk mendapat posisi sebagai Bupati dan Wakil Bupati, kelima pasangan tersebut adalah pasangan calon nomor urut satu Ashelfine-Sarikal dengan partai pengusung PAN, Demokrat, dan PDIP, pasangan calon nomor urut dua Endre Saiful-Nasrul yang masuk melalui jalur Independent, pasangan calon nomor urut tiga Benny Dwifa Yuswir-Iraddatilah dengan partai pengusung Nasdem, Golkar, PKB dan PBB, pasangan calon nomor urut empat Arrival Boy-Mendro Suarman dengan partai pengusung Perindo-Gerindra, dan pasangan calon terakhir Hendri Susanto-Indra Gunalan dengan partai pengusung PKS dan PKB.[11]

Tabel 1.1
Daftar Pasangan Calon dan Partai Koalisi

No	Pasangan Calon	Partai Koalisi
1.	Ashelfine-Sarikal	PAN, Demokrat, PDIP
2.	Endre Saiful-Nasrul	Independen
3.	Benny Dwifa Yuswir-Iradditilah	Nasdem, Golkar, PKB, PBB
4.	Arrival Boy-Mendro Suarman	Perindo, Gerindra
5.	Hendri Susanto-Indra Gumalan	PKS, PKB

Sumber: KPU Kabupaten Sijunjung

[11] Riki Chandra, "Pilkada Sijunjung 2020, Ini Nomor Urut 5 Paslon Bupati", https://www.tagar.id/pilkada-sijunjung-2020-ini-nomor-urut-5-paslon-bupati, diakses tanggal 20 September 2021 pukul 19.30 WIB.

Dalam sebuah portal berita oline, yang dikutip dari salah satu pengusaha muda asal Kamang Baru, Rizky Abdian Putra *"Kita saat ini butuh bupati dan bukan wakil bupati"*.[12] Penggunaan narasi seperti diatas menandakan bahwa, ada bentuk komunikasi atau issue yang digunakan oleh pasangan calon Benny Dwifa Yuswir-Irradatilah kepada masyarakat Kamang Baru. Banyaknya pasangan calon yang berasal dari Kamang Baru, namun hanya berada dalam posisi sebagai calon Wakil Bupati dan bukan sebagai calon Bupati, sehingga komunikasi yang dibangun seperti *"kita membutuhkan bupati bukan wakil bupati"* oleh tim pasangan calon Benny Dwifa Yuswir-Irradatilah memiliki keuntungan tersendiri bagi pasangan calon tersebut, dikarenakan Benny Dwifa Yuswir adalah putra asli Kamang Baru.

Pada tanggal 4 September 2020, pasangan Benny Dwifa Yuswir-Iraddatillah melakukan kunjungan kepada salah satu elit lokal Kecamatan Kamang Baru tepatnya di kediaman Syabudin Dt Sinaro yang sekarang mejabat sebagai Wali Nagari Kunangan Parit Rantang . Kunjungan ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh adat Kecamatan Kamang Baru, dengan adanya kunjungan ini peneliti menilai bahwa Pasangan benny Dwifa Yuswir-Iraddatillah ingin menguatkan komitmen dengan elit lokal di Kecamatan Kamang Baru sebelum pencalonan pada hari itu juga.

Persaingan lima pasangan calon yang begitu sengit, menghasilkan perolehan suara sebagai berikut Benny Dwifa Yuswir-Iraddatilah dengan perolehan 27,301 suara atau persentase 25,1% dari suara masyarakat sijunjung, posisi kedua ditempati oleh Hendri Susanto-Indra Gunalan dengan perolehan 24,376 atau

[12] Novitri Selvia, "Pilkada Sijunjung! Ini Alasan Tokoh Muda Ini Jagokan Benny Radi", https://padek.jawapos.com/politik/03/12/2020/pilkada-sijunjung-ini-alasan-tokoh-muda-ini-jagokan- benny-radi/ diakses pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 20.00 WIB.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

persentase 22,3%, posisi ketiga ditempati oleh Arrival Boy-Mendro Suarman dengan perolehan suara 21,385 atau persentase 19,6%, posisi keempat ditempati oleh Ashelfine-Sarikal dengan perolehan suara 18,955 atau persentase 17,4%, dan posisi terakhir ditempati oleh pasangan calon yang masuk melalui jalur independen yaitu Endre Saiful-Nasrul dengan perolehan suara 17,142 atau persentase 14,7%.[13]

Tabel 1.2
Jumlah Perolehan Suara

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Ashelfine-Sarikal	18,955 Suara
2.	Endre Saiful-Nasrul	17,142 Suara
3.	Benny Dwifa Yuswir-Iradditilah	27,301 Suara
4.	Arrival Boy-Mendro Suarman	21,384 Suara
5.	Hendri Susanto-Indra Gumalan	24,376 Suara

Sumber: Pilkada2020.kpu.go.id

Melihat hasil perolehan suara di atas, pasangan calon Benny Dwifa Yuswir-iraddatilah yang merupakan anak dari Bupati Sijunjung sebelumnya memperoleh suara terbanyak dalam rekapitulasi Pilkada Sijunjung 2020 dengan total 27,301 suara. Pasangan calon Benny Dwifa Yuswir-Iraddatilah merupakan penantang baru yang secara Track Record perpolitikan, Benny Dwifa Yuswir merupakan birokrat dan politisi partai Golkar yang pernah menjabat sebagai Camat Kecamatan Sijunjung periode 2015-2020, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Badan Pembangunan Perencanaan Daerah (Bappeda), sedangkan pasangannya Iraddatilah merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

[13] KPU Sumbar, "Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung", https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/rekapitulasi/1303 , diakses tanggal 20 September 2021 pukul 19.30 WIB.

yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sumatera Barat periode 2014-2019.[14]

Kemenangan dan perolehan suara pasangan Benny Dwifa Yuswir-Iraddatilah tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, berdasarkan wawancara peneliti dengan salah seorang tim kampanye pasangan Benny Dwifa Yuswir-Irradatillah yaitu Deni Rahmadani, di dapatkan data bahwasanya proses komunikasi untuk mengamankan suara yang dilakukan oleh pasangan Benny Dwifa Yuswir Irradatillah banyak melibatkan dengan elit lokal dan birokrasi setempat.[15]

> "Komunikasi yang dilakukan oleh pasangan Benny Dwifa Yuswir-Irradatillah banyak dilakukan dengan elit lokal setempat dan melakukan kampanye secara langsung, namun jika dibandingkan lebih banyak dilakukan dengan elit lokal setempat. Dalam proses komunikasi juga banyak dibantu oleh tim ayahnya yaitu tim Yuswir Arifin"

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti melihat bahwasanya pasangan Benny Dwifa Yuswir banyak melakukan komunikasi politik dengan elit lokal setempat di Kecamatan Kamang Baru, hal ini menandakan perolehan suara yang dilakukan banyak dibantu okeh elite lokal setempat, seperti niniak mamak, wali nagari, kepala jorong, dan pemuda nagari.

---

[14] KPU Sijunjung, "Syarat Calon Kepala Daerah", https://infopemilu2.kpu.go.id/file/dok/syarat_calon/SYARAT_CALON_CAKADA_2_0130990102_Benny_Dwifa_Yuswir diakses 20 September 2021 pukul 19.00 WIB.

[15] Wawancara dilakukan dengan Deni Rahmadani pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 19.00 WIB melalui media sosial Whatsapp.

Dengan munculnya elit lokal sebagai kekuatan yang mempengaruhi perolehan suara, hal ini menandakan bahwa ada betuk hubungan kekuasaan yang dibangun oleh pasangan Benny Dwifa Yuswir-Irradatilah dengan memanfaatkan kekuatan elit lokal setempat untuk mempengaruhi masyarakat dan memperoleh suara yang lebih banyak. Keterlibatan elit lokal ini menjadi salah satu faktor penentu dalam lonjakan suara yang besar pasangan Benny Dwifa Yuswir-Irradatilah di Kecamatan Kamang Baru.

Peran elit lokal sebagai mediator atau agent dalam mengkampanyekan pasangan Benny Dwifa Yuswir-Irradatilah, elit lokal menjadi aktor yang berperan penting dalam proses kampanye dan mempengaruhi massa. Peran elit dalam proses kampanye ini dijelaskan dalam teori komunikasi dua tahap bahwa bentuk pesan yang disampaikan tidak akan langsung mengenai audience, namun ada peran dari pihak lain dalam menyampaikan pesan dari komunikasi tersebut, dalam hal ini adalah elit lokal.

Pilkada Sijunjung 2020, menghasilkan pasangan Benny Dwifa Yuswir-Iradditilah sebagai pemenangan dengan perolehan 27,301 suara dan menggugurkan empat pasangan calon lainnya. Benny Dwifa Yuswir yang merupakan seorang birokrat mampu mengalahkan Arrival Boy yang merupakan mantan wakil bupati periode sebelumnya, yang pada pilkada 2020 kemarin maju sebagai calon Bupati dengan menggandeng Mendro Suarman sebagai calon Wakil Bupati. Ini menandakan bahwa pasangan Benny Dwifa Yuswir-Iraddatillah memiliki kekuatan dan strategi untuk menyaingi keempat pasangan calon lainnya,

yang secara kekuatan politik dapat dikatakan bahwa keempat pasangan calon tersebut merata.[16]

Seperti salah satu fungsi komunikasi politik, yaitu fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) yang di sebut pula dengan istilah the sociopolitical sphere, yaitu sebagai agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil agregasi dan atrikulasi tersebut.

Apabila di lihat secara umum, maka fungsi komunikasi politik pada hakikatnya sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur yang bersifat interpendensi dalam ruang lingkup negara. Komunikasi ini bersifat timbal balik atau dalam pengertian lain saling merespon sehingga mencapai saling pengertian dan di orientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Sehingga komunikasi politik dapat di simpulkan sebagai komunikasi yang melibatkan di dalamnya pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau komunikasi yang berkaitan dengan kekuasaan, jalannya pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Proses komunikasi politik di maknai sebagai proses penyampaian pesan.[17]

Seperti yang dijelaskan di atas, komunikasi politik di dalamnya melibatkan aktor- aktor politik. Pada pilkada Sijunjung 2020 pasangan Benny Dwifa Yuswir-Irradatilah melakukan komunikasi politik dengan melibatkan elit-elit lokal pada

---

[16] https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/rekapitulasi/1303, diakses tanggal 21 September 2021 pukul 22.00 WIB

[17] Masduki Anang, R.W. 2014. Efektifitas Strategi Komunikasi Politik Muhammadiyah DIY dalam Pemenangan Pemilu DPD-RI Tahun 2014. *Jurnal Of Cummunication Studies*, 5(1), hlm 1-18

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Kecamatan Kamang Baru. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Deni Rahmadani pada tanggal 16 Maret 2022 didapatkan bahwa Pasangan Benny Dwifa Yuswir-Irradatilah melibatkan elit-elit lokal dalam mengamankan suaranya untuk wilayah Kecamatan Kamang Baru. Peran elit-elit lokal ini sangat sentral dalam meningkatkan suara pasangan Benny Dwifa Yuswir untuk wilayah Kamang Baru.

Keterlibatan elit lokal sebagai agent yang mengkampanyekan dan mempengaruhi massa, menjadi salah satu strategi komunikasi politik yang dilakukan pasangan Benny Dwifa Yuswir-Irraditilah pada Pilkada Sijunjung 2020. Penggunaan teori komunikasi dua tahap digunakan untuk melihat peran elit lokal sebagai opinion leader dalam Pilkada, teori ini digunakan juga sebagai salah satu upaya untuk mengungkap aktifitas dan peran elit dalam mempengaruhi massa.

Pada penelitian kali ini peneliti berasumsi bahwa kemenangan pasangan Benny Dwifa Yuswir-Iraddatilah diakibatkan oleh komunikasi yang dibangun dengan elit-elit lokal setempat, dimana pola komunikasi pasangan Benny Dwifa Yuswir-Iraddatilah dengan elit lokal Kecamatan Kamang Baru mengakibatkan terjadinya lonjakan suara di Kecamatan Kamang Baru. Hal ini dibuktikan dengan melonjaknya perolehan suara pasangan Benny Dwifa Yuswri-Iraddatilah di Kecamatan Kamang Baru dengan total perolehan suara 8,005 suara.[18]

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi politik

[18] https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/rekapitulasi/1303, diakses tanggal 21 September 2021 pukul 22.00 WIB

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

yang dilakukan pasangan Benny Dwifa Yuswir-Iradditilah terhadap elit lokal Kecamatan Kamang Baru dalam Pilkada Sijunjung Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis faktor dalam komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan Benny Dwifa Yuswir-Iradditlah terhadap elit lokal di Kecamatan Kamang Baru pada pilkada Sijunjung Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Akademis

   Penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana strategi komunikasi politik pasangan Benny Dwifa Yuswir-Iradditilah pada Pilkada Sijunjung 2020.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi bagi calon Kepala Daerah, Tim Sukses dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA